

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan DI kabupaten  
Bantul 2017-218**

Oleh:

**Muhammad Rakhman  
20130520042**

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2019

Tempat : Ruang Ujian IP 2

Pukul : 08.00 - 09.00 WIB

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Suranto, M.Pol.**

**NIK: 19650812199105163014**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Isnaini Maulidin, S.IP., MPA.**

**NIK:19710225201204163130**

**Bachtiar Dwi Kurniawan, Fil.I ., MPA.**

**NIK: 19810929201204163128**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

**NIK: 19660828199403163025**

# **KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN BANTUL 2017-2018**

Muhammad Rakhman

20130520042

Email: boymanrakhman@gmail.com

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2017 jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 82 orang, Kota Yogyakarta sebesar 78 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 64 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 43 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 60 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2017). Pada tahun 2018 jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 114 orang, Kota Yogyakarta sebesar 80 orang, Kabupaten Gunungkidul sebesar 72 orang, Kabupaten Kulonprogo sebesar 49 orang dan Kabupaten Sleman sebesar 60 orang (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2018). Untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, sudah merupakan tugas pemerintah tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Program menanggulangi anak jalanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul adalah melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program-program yang disusun dalam dokumen perencanaan setiap lima tahun sekali mengalami perubahan nama program namun memiliki target yang sama, sehingga kajian dari penelitian ini akan memperdalam program yang diadakan pemerintah untuk menanggulangi anak jalanan di Kabupaten Bantul. Program tersebut sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait apa kinerja Dinas Sosial Dalam Program Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul ditinjau dari 4 indikator yaitu efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap. Dari 4 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menangani I anak jalanan masih kurang baik, karena pada kenyataannya masih ada beberapa anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Bantul hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah anak jalanan kembali. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul adalah

faktor individu, faktor kepemimpinan dan faktor kerjasama tim. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan ketiga faktor tersebut sudah terselenggara cukup baik.

## **ABSTRACT**

*In 2017 the number of street children in Bantul Regency was 82 people, Yogyakarta City was 78 people, Gunungkidul Regency was 64 people, Kulonprogo Regency was 43 people and Sleman Regency was 60 people (Yogyakarta Provincial Social Service, 2017). In 2018 the number of street children in Bantul Regency was greater than other districts in DI Yogyakarta Province, which amounted to 114 people, Yogyakarta City was 80 people, Gungkidul District was 72 people, Kulonprogo Regency was 49 people and Sleman District was 60 people (DIY Provincial Social Service, 2018). To overcome the problems of street children, it is the government's duty to guide and foster children's welfare in ensuring the growth and development of their physical, spiritual and social aspects. The program for tackling street children that has been carried out by the government of Bantul Regency is through the Social Welfare Service and Rehabilitation Program. The programs compiled in the planning document every five years experience a change in the name of the program but have the same target, so the study of this study will deepen the program held by the government to tackle street children in Bantul Regency. The program is as a determination of actions to solve the problems faced, so that the program is a type of plan that is arranged more concretely, it contains a set of different activities but leads to one common goal.*

*This type of research is qualitative descriptive, which provides an overview of the problems studied related to the performance of the Social Service in the Street Children Handling Program in Bantul Regency.*

*The results of the study showed that the performance of the Social Service Office of Bantul Regency was viewed from 4 indicators, namely efficiency, effectiveness, fairness and responsiveness. From these 4 indicators it can be concluded that the performance of the Bantul District Social Service in handling street children is still not good, because in reality there are still some street children spread in Bantul Regency as evidenced by an increase in the number of street children back. Factors that influence the performance of the Social Service in handling street children in Bantul Regency are individual factors, leadership factors and teamwork factors. These three factors have a significant influence on the performance of the Bantul District Social Service and the three factors have been carried out quite well.*

## **PENDAHULUAN**

Penyandang  
Kesejahteraan sosial  
merupakan seseorang, keluarga atau

Masalah  
(PMKS)

kelompok masyarakat yang karena  
suatu hambatan, kesulitan atau  
gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah anak jalanan. Faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan dikarenakan faktor ekonomi (kemiskinan), masalah keluarga, broken home, perceraian orang tua atau keluarga sering cekcok, dalam diri anak itu sendiri dan lingkungan tempat tinggal (Darmanto, 2007).

Berdasarkan Data Kementerian Sosial RI pada tahun 2006, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia sebanyak 232.894 orang. Kemudian pada 2010 ada 159.230 anak jalanan, 2011 turun menjadi 67.607 anak jalanan, dan 2015 menjadi turun lagi menjadi 33.400 anak jalanan (<https://www.jawapos.com/jpg-today/20/11/2017/data-kemensos-masih-ada-16920-anak-jalanan>).

Berdasarkan data di atas di diketahui bahwa pada tahun 2012 jumlah gelandangan yaitu sebanyak 250 orang, pengemis sebanyak 235 orang, pemulung sebanyak 623 orang, anak terlantar sebanyak 15.376 orang, anak jalanan sebesar 479, pada tahun 2013 jumlah gelandangan sebanyak 237 orang, pengemis sebanyak 227 orang, pemulung sebanyak 595 orang, anak terlantar sebanyak 15.250 orang, anak jalanan sebesar 465, pada tahun 2014 jumlah gelandangan sebanyak 265 orang, pengemis sebanyak 217 orang, pemulung sebanyak 583 orang, anak

terlantar sebanyak 14.860 orang, anak jalanan sebesar 427, pada tahun 2015 jumlah gelandangan sebanyak 228 orang, pengemis sebanyak 197 orang, pemulung sebanyak 567 orang, anak terlantar sebanyak 14.680 orang, anak jalanan sebesar 379, pada tahun 2016 jumlah gelandangan sebanyak 204 orang, pengemis sebanyak 183 orang, pemulung sebanyak 543 orang, anak terlantar sebanyak 14.570 orang, anak jalanan sebesar 354, pada tahun 2017 jumlah gelandangan sebanyak 171 orang, pengemis sebanyak 150 orang, pemulung sebanyak 450 orang, anak terlantar sebanyak 14.450 orang, anak jalanan sebesar 327, pada tahun 2018 jumlah gelandangan sebanyak 236 orang, pengemis sebanyak 170 orang, pemulung sebanyak 511 orang, anak terlantar sebanyak 13.960 orang, anak jalanan sebesar 348

Berdasarkan data-data tersebut dan observasi diketahui bahwa kinerja Dinas Sosial dalam program penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul belum berjalan dengan optimal dengan masih banyak ditemukannya/masih dijumpai di jalan-jalan, perempatan lampu merah, restoran, mall dan tempat-tempat umum lainnya, apalagi bulan ramadhan anak jalanan seketika meningkat pesat dan datang dari berbagai daerah. Jumlah anak jalanan didominasi oleh anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sedangkan gelandangan dan pengemis kebanyakan berada di pasar tradisional. Aksi anak jalanan berkedok pakaian kusam, jadi pengamen dan ada juga yang membawa gelas air mineral untuk meminta-minta belas kasihan, berpakaian badut kepada pengendara motor dan mobil. Selain itu juga

program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan anak jalanan adalah melakukan razia terhadap anak jalanan selama 2 kali dalam sebulan dengan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang dinamakan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC). Apabila dalam razia didapatkan anak jalanan maka anak jalanan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DIY untuk dilakukan pembinaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul?

### **B. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan adalah :

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa faktor pendukung dan penghambat dari kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul.

### **C. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Mengembangkan pengetahuan mahasiswa dalam hal penyusunan program pemerintah dalam menanggulangi jumlah anaka jalanan di Kabupaten Bantul.
  - b. Menambah wawasan mahasiswa dan mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapat selama bangku kuliah mengenai penanganan anak jalanan.
2. Bagi Instansi Terkait
  - a. Membangun relasi dengan perguruan tinggi maupun dengan mahasiswa.
  - b. Dapat memanfaatkan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu sumber informasi terkait dengan tempat praktek tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk meminimalisir kendala.

### **D. Kinerja**

Kinerja memiliki makna yang lebih las bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja tersebut berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Wibowo, 2008:7). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Wibowo (2011:100) adalah :

- 1) *Personal factors*, merupakan faktor yang ditunjukkan

dengan tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.

- 2) *Leadership factors*, merupakan faktor ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan *team leader*.
- 3) *Team factors*, merupakan faktor ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
- 4) *System factors*, merupakan faktor ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- 5) *Contextual/situational factors*, merupakan faktor ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Mangkuprawira (2009:155), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Intrinsik, merupakan personal individu yang meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2) Faktor Ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, situasional, dan konflik, meliputi unsur :

- a) faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam memberikan dorongan semangat, arahan dan dukungan kerja kepada karyawan
- b) Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim
- c) Faktor Sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi
- d) Faktor Situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal
- e) Faktor Konflik, meliputi konflik dalam diri, konflik antar individu dan konflik antar kelompok.

Dan teori yang saya pakai untuk mengukur kinerja adalah Kriteria yang digunakan menjadi pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain: (1) Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang organisasi pelayanan publik dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan tentang organisasi pelayanan publik dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal

dari rasionalitas ekonomi (2) Efektifitas, yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut bisa tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis nilai, misi dan tujuan organisasi, (3) Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini diselenggarakan oleh organisasi pelayanan

publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastian, (4) Daya tanggap, yaitu organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini (Kumorontomo (2011 : 23).

## **Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul ditinjau dari 4 indikator yaitu efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap. Dari 4 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menangani anak jalanan masih kurang baik, karena pada kenyataannya masih ada beberapa anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Bantul hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah anak jalanan kembali.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul adalah faktor individu, faktor kepemimpinan dan faktor kerjasama tim. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan ketiga faktor tersebut sudah terselenggara cukup baik.

### **B. Saran**

1. Penambahan sumber daya manusia dengan penambahan pegawai tetap atau penambahan pegawai honorer dalam membantu masalah

penanganan anak jalanan. Selain itu penambahan personil dalam pendampingan anak jalanan.

2. Peningkatan kerja sama untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dibutuhkan peningkatan kerja sama dengan panti-panti sosial atau Rumah Perlindungan Sosial Anak yang peduli tentang permasalahan anak jalanan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sosial.
3. Peningkatan anggaran dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak swasta atau lembaga yang peduli dengan penanganan masalah anak jalanan.
4. Segera disahkannya Perwal sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan **Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak** agar tidak menghambat Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penanganan anak jalanan. Hal ini dilakukan agar penanganan masalah anak jalanan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
5. Peningkatan penanganan masalah anak jalanan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan yaitu dengan tidak memberikan uang kepada anak jalanan tujuannya agar

jumlah anak jalanan tidak terus bertambah.

6. Peningkatan penanganan masalah anak jalanan melalui komitmen *stakeholders* dengan dukungan perda yang ada dengan cara kerja sama yang dilakukan dengan SKPD terkait penanganan masalah anak jalanan seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Contohnya kerja sama dengan Dinas Pendidikan akan membantu Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengatasi permasalahan anak jalanan seperti anak jalanan yang putus sekolah bisa difasilitasi dalam mengikuti ujian paket sesuai dengan tingkat pendidikannya.
7. Mengoptimalkan sosialisasi pelarangan memberi uang kepada anak jalanan dengan dukungan dan komitmen *stakeholders*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung. Contohnya dengan memasang baliho atau spanduk dan himbuan disekitar *traffic light* terkait pelarangan pemberian uang, dan juga meningkatkan sosialisasi peraturan tentang pelarangan pemberian uang kepada anak jalanan dan sanksi yang akan diterima jika tetap memberikan uang.
- 8.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arifin, Syamsul. 2017. Pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung.

Armstrong, Michael. 2009. *Hanbook Of Performance Management*, 4

TH Edition. London and Philadelphia : Kogan Page Limited

Darmanto, Eko. 2007. Perlindungan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Yogyakarta. *Tesis* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dessler, Gary. 2013. *Human Resources Management*, 13th Edition. New Jersey USA : Prentice Hall

Dinas Sosial Provinsi DIY. 2011. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011

----- . 2012. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2012.

----- . 2013. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2013.

----- . 2014. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2014.

----- . 2015. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2015.

----- . 2016. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2016.

----- . 2017. Data Anak Jalanan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2017.



- Dinas Sosial Provinsi DIY. 2018. Jenis-Jenis PMKS, diakses dari <http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/> pada tanggal 5 September 5 September 2018
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2012. Kementerian Sosial Dalam Angka Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: alfabeta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2011. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Luthans, Fred. 2010. *Organizational Behavior: An Evidence-based Approach*, Twelfth Edition. USA : McGraw-Hill Irwin
- Mahmudi. 2005. *Manajemen kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2008. *Manajemen sumberdaya manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakara
- Mathis R.L. dan Jackson J.H., 2008. *Human Resources Management*. Ed. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Pasolong, Harbani. 2010 *Teori administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S. P. 2006. *Perilaku Organisasi*. 8<sup>th</sup> ed, Jilid 1. Jakarta: PT. Prehallindo
- Rukminto Adi, Isbandi. 2010. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Ed II. Jakarta: Rajawali
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Cetakan 2. Bandung: Alfabeta
- Torrington, Derek., Hall, Laura., Taylor, Stephen. 2009. *Human Resource Management*. USA : FT Prentice Hall

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*.  
Jakarta : Raja Grafindo

Wibowo , 2008. *Manajemen Kinerja*.  
Jakarta.Raja Grafindo persada

### **Jurnal, Makalah, Skripsi :**

Apriliani, Nita. 2015. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada Karyawan CV. Sahabat Klaten). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Gafur, Abdul. 2017. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. *Skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Huruswati, Indah. 2015. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Desa Tertinggal Melalui Rumah Sosial. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 04, No. 02, Januari – April Tahun 2015

Rahardjo, Gatot., Chairy., Sedyaningsih, Sri. 2014. “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” pada PT. Citra Sukses Eratama,

Tangerang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif* Vol. 1 No. 1, 2014, artikel 6

Witdayanti, Yuli. 2016. Implementasi Perda Diy Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Di Kota Yogyakarta. *Skripsi* Jurusan Manajemen Dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Peraturan/ Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.